LAHIRNYA MADRASAH POLITIK DAN IDEOLOGI ANALISIS NIZAM AL MULK

Sri Wahyuni[1], Muhammad Afyar[2], Hamdi Abdul Karim[3]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : [1]sri7214@guru.sd.belajar.id, [2]muhammadafyar85@gmail.com,
[3]hamdiabdulkarim@uinbukittinggi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji proses historis dan sosiologis lahirnya madrasah politik dan ideologi dalam peradaban Islam klasik, dengan menitikberatkan pada pemikiran serta kontribusi monumental Khawaja Nizam al-Mulk. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research), data dikumpulkan dari literatur primer seperti risalah Siyasat-namah karya Nizam al-Mulk serta sumber sekunder berupa buku sejarah dan jurnal ilmiah relevan, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi dan deskriptif-interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian institusi pendidikan tinggi Madrasah Nizhamiyah dan perumusan teologi politik dalam Siyasat-namah merupakan respons strategis terhadap krisis disintegrasi kekhalifahan Abbasiyah dan ancaman gerakan heterodoksi, khususnya Syiah Ismailiyah Batiniyah. Dialektika antara otoritas militer Dinasti Seljuk, ortodoksi Ahlus Sunnah wal Jamaah (Asy'ariyah), dan tradisi tata kelola Persia berhasil menciptakan sintesis politik yang kuat. Madrasah berfungsi ganda: sebagai pusat transmisi keilmuan dan sebagai instrumen hegemoni ideologis negara untuk mencetak birokrat yang loyal serta menjaga stabilitas politik imperium.

Kata Kunci : *Nizam al-Mulk, Siyasat-namah, Madrasah Nizhamiyah, Politik Islam, Ideologi, Dinasti Seljuk.*

ABSTRACT

This study examines the historical and sociological emergence of political and ideological madrasas in classical Islamic civilization, focusing on the thought and monumental contributions of Khawaja Nizam al-Mulk. Employing a qualitative approach through library research, data were gathered from primary literature such as Nizam al-Mulk's Siyasat-namah and secondary sources including historical books and relevant scientific journals, then analyzed using content analysis and descriptive-interpretative methods. The findings indicate that the establishment of the Nizhamiyah Madrasah and the formulation of political theology in Siyasat-namah served as strategic responses to the crisis of Abbasid disintegration and the threat of heterodox movements, particularly Ismaili Shiism (Batiniyah). The dialectic between the military authority of the Seljuk dynasty, Sunni orthodoxy (Ash'arism), and Persian governance traditions successfully created a robust political synthesis. The madrasah functioned dually as a center for scholarly transmission and as an ideological instrument of the state to cultivate loyal bureaucrats and maintain imperial political stability.

Keywords : *Dialectic of Islam, Local Wisdom, Educational Culture, Indigenization of Islam, Wasathiyah*

PENDAHULUAN

Sejarah pemikiran politik Islam klasik tidak dapat dilepaskan dari dinamika transisi kekuasaan, perebutan legitimasi, serta pergulatan ideologis antara berbagai mazhab teologi dan politik. Pada abad ke-11 Masehi, dunia Islam mengalami titik balik krusial dengan merosotnya otoritas pusat Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dan bangkitnya kekuatan militer dinasti-dinasti baru, salah satunya adalah Dinasti Seljuk dari rumpun bangsa Turki (Lambton, 1981). Dalam situasi yang penuh dengan fragmentasi politik, instabilitas keamanan, dan ancaman heterodoksi keagamaan terutama dari gerakan Syiah Ismailiyah Batiniyah dan propaganda Fatimiyah di Kairo dibutuhkan sebuah grand strategy untuk menyatukan kembali umat Islam di bawah satu payung ideologis dan politis yang kokoh (Hitti, 2005).

Di tengah krisis multidimensional inilah figur Abu Ali al-Hasan ibn Ali ibn Ishaq al-Tusi, yang lebih dikenal sebagai Nizam al-Mulk (1018–1092 M), muncul sebagai arsitek utama peradaban Islam era pertengahan. Menjabat sebagai wazir agung selama lebih dari tiga dekade di bawah dua penguasa Seljuk, Alp Arslan dan Maliksyah, Nizam al-Mulk tidak hanya mengendalikan roda pemerintahan imperium yang membentang dari Transoxiana hingga Suriah, tetapi juga merevolusi lanskap intelektual, pendidikan, dan tata kelola negara (Boyle, 1968). Melalui kebijakan-kebijakannya, ia mendirikan jaringan institusi pendidikan formal yang dikenal luas sebagai Madrasah Nizhamiyah dan menulis risalah kenegaraan monumental berjudul Siyasat-namah (The Book of Government) (Miskawayh, 2014).

Pertanyaan mendasar yang hendak dijawab dalam artikel ini adalah Bagaimana proses lahirnya madrasah politik dan ideologi yang dirintis oleh Nizam al-Mulk, serta sejauh mana sintesis antara tradisi politik Persia, doktrin teologi Asy'ariyah, dan struktur kekuasaan Seljuk mampu menyelamatkan serta membentuk wajah peradaban Islam klasik? Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi kerangka pemikiran politik Nizam al-Mulk secara komprehensif, meneliti fungsi strategis Madrasah Nizhamiyah sebagai instrumen hegemoni ideologis negara, dan mengevaluasi relevansi konsep-konsep tersebut dalam diskursus politik kontemporer.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) (Creswell, 2018). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada penggalian data teoretis, konseptual, dan historis mengenai dialektika antara kekuasaan politik, ideologi keagamaan, dan pelembagaan pendidikan di era Dinasti Seljuk. Penelitian pustaka dinilai paling relevan untuk menelaah literatur mendalam, naskah akademik, sumber primer seperti teks Siyasat-namah, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas irisan antara sosiologi politik Islam dan sejarah peradaban (Zed, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder:

1. Sumber Primer yaitu literatur klasik dan terbitan otoritatif yang memuat pemikiran langsung Nizam al-Mulk, terutama risalah kenegaraan Siyasat-namah serta dokumen sejarah sezaman (Nizam al-Mulk, 1960).
2. Sumber Sekunder yaitu buku penunjang, artikel jurnal ilmiah bereputasi, prosiding seminar, dan literatur sejarah modern yang mengkaji Dinasti Seljuk dan Madrasah Nizhamiyah (Sugiyono, 2019; Makdisi, 1981).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara menghimpun, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menelaah literatur tertulis yang berkaitan dengan tema penelitian (Moleong, 2021). Analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif-interpretatif (Krippendorff, 2018), meliputi reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi sistematis, serta penarikan kesimpulan untuk merumuskan sintesis teoretis mengenai lahirnya madrasah politik dan ideology. Analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-interpretatif (Krippendorff, 2018). Tahapan analisis ini meliputi:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*): Menyortir, memilah, dan memfokuskan data dari berbagai literatur yang relevan dengan fokus kajian dialektika pendidikan dan kearifan lokal, serta membuang informasi yang tidak signifikan.
2. Penyajian Data (*Data Display*): Menyusun sekumpulan informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif secara sistematis, logis, dan terstruktur agar pola hubungan antara Islam dan budaya lokal dapat tergambar secara utuh.
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*): Melakukan interpretasi mendalam terhadap data yang telah disajikan guna merumuskan sintesis teoretis mengenai implikasi dialektika tersebut terhadap pembentukan kultur pendidikan masyarakat modern (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konteks Historis Dan Sosio-Politik Abad Ke-11 M

Abad ke-11 M merupakan era transisi yang sangat dinamis sekaligus rapuh dalam sejarah dunia Islam. Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad yang pada masa lalu menjadi pusat kekuasaan tunggal, telah mengalami kemunduran politis yang parah sejak abad ke-10. Meskipun simbol keagamaan dan legitimasi formal spiritual tetap berada di tangan Khalifah Abbasiyah, kekuasaan de facto telah berpindah tangan ke berbagai dinasti militer regional, terutama Dinasti Buwaihi yang berhaluan Syiah di Persia dan Irak, serta Dinasti Fatimiyah di Mesir yang mengusung mazhab Ismailiyah (Lapidus, 2002).

Situasi ini menciptakan ketidakstabilan akut. Konflik sektarian antara Sunni dan Syiah sering kali meletus di jalan-jalan Baghdad dan kota-kota besar lainnya. Di sisi lain, ancaman militer dari Kekaisaran Bizantium di perbatasan barat serta pergerakan suku-suku nomaden Turkik dari stepa Asia Tengah menambah kompleksitas ancaman terhadap eksistensi dunia Islam Sunni. Ketika suku-suku Seljuk di bawah pimpinan pemimpin-pemimpin mereka berhasil menaklukkan Persia dan memasuki Irak, mereka menyatakan diri sebagai pelindung kaum Sunni dan Khalifah Abbasiyah, sekaligus merestorasi otoritas ortodoksi Islam (Cahen, 1968).

Namun, kedatangan bangsa Seljuk yang berlatar belakang budaya nomaden menimbulkan tantangan administratif yang besar. Mereka membutuhkan birokrasi yang berpengalaman, sistem administrasi fiskal yang mapan, serta legitimasi ideologis yang dapat diterima oleh populasi urban yang mayoritas beragama Islam. Pada titik inilah Nizam al-Mulk, seorang birokrat cerdas berdarah Persia, masuk mengisi kekosongan strategis tersebut. Ia menyadari bahwa kemenangan militer semata tidak akan mampu mempertahankan imperium tanpa adanya kesatuan ideologi, dukungan kelas ulama, dan tata kelola administrasi yang tertib (Gibb, 1962).

Nizam Al-Mulk Arsitek Politik Dan Ideologi Imperium Seljuk

Nizam al-Mulk lahir di Tus, Khurasan, pada tahun 1018 M. Ia mengawali kariernya di bawah dinasti Ghaznawiyah sebelum kemudian bergabung dengan Dinasti Seljuk di bawah pimpinan Sultan Alp Arslan. Berkat kecakapan manajerial, kecerdasan diplomatik, dan wawasan politiknya yang luas, ia dengan cepat diangkat sebagai Wazir Agung (Vezir) dengan gelar 'Nizam al-Mulk' (Penyusun Keteraturan / Pilar Kerajaan) yang diberikan langsung oleh Khalifah Al-Qaim (Boyle, 1968).

Sebagai wazir, Nizam al-Mulk memegang kendali atas urusan sipil, finansial, dan hubungan eksternal imperium. Ia membangun sistem administrasi sentralistik yang efisien, menata kembali sistem perpajakan agraris (iqta'), dan mengamankan jalur-jalur perdagangan dari gangguan kelompok pemberontak, termasuk gerakan Assassin (Batiniyah) yang dipimpin oleh Hasan al-Sabah (Daftary, 1990). Bagi Nizam al-Mulk, stabilitas politik (nizam al-mulk) tidak dapat dipisahkan dari keadilan sosial, kepatuhan terhadap hukum agama, dan dukungan penuh terhadap ulama ortodoks.

Lebih dari sekadar administrator, Nizam al-Mulk adalah seorang pemikir politik yang menempatkan dirinya dalam garis tradisi cermin para pangeran (mirror for princes) warisan peradaban Persia Kuno (Sasaniyah), yang disintesiskan secara harmonis dengan nilai-nilai universal Islam. Ia memandang bahwa raja atau sultan adalah bayangan Tuhan di muka bumi (zill Allah fi al-ardh) yang diemban tugas suci untuk menegakkan keadilan, melindungi agama, dan menumpas kezaliman (Lambton, 1956).

Madrasah Nizhamiyah Institusionalisasi Pengetahuan Dan Hegemoni Ideologi

Kontribusi paling revolusioner Nizam al-Mulk dalam sejarah peradaban Islam adalah pendirian jaringan lembaga pendidikan tinggi formal yang dikenal sebagai Madrasah Nizhamiyah. Madrasah pertama didirikan di Baghdad pada tahun 1067 M, diikuti oleh pendirian cabang-cabang lain di kota-kota besar imperium Seljuk seperti Nisyapur, Isfahan, Merv, Herat, Basra, dan Mosul (Makdisi, 1981). Sebelum era Nizhamiyah, pendidikan tinggi Islam umumnya bersifat informal, berlangsung di masjid-masjid melalui sistem halaqah (lingkaran studi) di sekitar ulama tertentu tanpa kurikulum terstandar atau dukungan finansial tetap.

Madrasah Nizhamiyah mengubah lanskap tersebut secara radikal. Lembaga ini dilengkapi dengan gedung permanen, asrama mahasiswa, perpustakaan besar, serta sistem penggajian (stipend) yang mapan bagi para profesor (mudarris) dan mahasiswa. Sumber pendanaan madrasah berasal dari sistem wakaf (charitable endowment) yang dikelola secara profesional, sehingga menjamin independensi finansial sekaligus kelangsungan institusi dalam jangka panjang (Heffening, 1934).

Dari perspektif sosiologi politik, pendirian Madrasah Nizhamiyah bukan sekadar kegiatan filantropis di bidang pendidikan, tetapi merupakan proyek ideologis dan politis yang disengaja. Tujuan utama pendirian madrasah ini meliputi:

1. MenCounter Ideologi Syiah dan Heterodoksi

Madrasah Nizhamiyah dirancang secara khusus untuk membendung penyebaran teologi Syiah Ismailiyah yang dikembangkan oleh Universitas Al-Azhar di Kairo di bawah kekuasaan Fatimiyah, serta gerakan Batiniyah di Persia.

2. Mengkonsolidasikan Teologi Asy'ariyah dan Mazhab Syafi'i

Kurikulum madrasah secara ketat mengajarkan teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Asy'ariyah dalam bidang akidah dan mazhab Syafi'i dalam bidang yurisprudensi (fiqh), guna menciptakan keseragaman ortodoksi keagamaan di seluruh wilayah imperium.

3. Mencetak Birokrat dan Pegawai Negara yang Loyal

Lulusan Madrasah Nizhamiyah dipersiapkan untuk mengisi posisi-posisi penting di dalam birokrasi pemerintahan Seljuk, seperti qadi (hakim), khatib, mufti, sekretaris (katib), dan administrator sipil yang memiliki loyalitas tinggi kepada negara dan sultan. Dengan demikian, Madrasah Nizhamiyah berfungsi sebagai pabrik ideologi negara yang berhasil menyatukan kaum ulama dan penguasa militer dalam satu aliansi strategis yang saling menguntungkan (Halm, 1997).

Siyasat-Namah Kitab Kenegaraan Dan Filsafat Politik Praktis

Selain membangun infrastruktur pendidikan, warisan intelektual terbesar Nizam al-Mulk adalah risalah politik berjudul Siyasat-namah (atau Siyar al-Muluk, Kitab Pemerintahan). Karya ini ditulis menjelang akhir hayatnya atas permintaan Sultan Maliksyah, yang meminta para wazir dan penasihat kerajaan untuk menyusun panduan komprehensif mengenai tata kelola negara, kebijakan publik, dan pencegahan disfungsi birokrasi (Nizam al-Mulk, 1960).

Siyasat-namah terdiri dari 50 bab yang membahas berbagai aspek praktis pemerintahan, mulai dari etika kepemimpinan, pengawasan mata-mata (informan kerajaan), tata cara sidang pengadilan mazhalim (penzoliman), manajemen militer, hingga kewaspadaan terhadap gerakan subversif dan bid'ah keagamaan. Dalam karyanya, Nizam al-Mulk menegaskan bahwa stabilitas politik sangat bergantung pada keadilan penguasa dan perhatiannya terhadap kesejahteraan rakyat (Boyle, 1968). Beberapa pilar utama pemikiran politik yang terkandung dalam Siyasat-namah antara lain:

1. Konsep Keadilan dan Hubungan Agama-Negara

Nizam al-Mulk memandang agama (din) dan kekuasaan politik (mulk) sebagai saudara kembar (twins). Tanpa agama, kekuasaan akan menjadi tirani; tanpa kekuasaan politik, agama akan kehilangan perlindungan dan keteraturan.

2. Pengawasan Birokrasi dan Anti-Korupsi

Ia menekankan pentingnya sistem pengawasan ketat melalui jaringan mata-mata (muhsif) untuk mencegah penyelewengan kekuasaan, korupsi, dan kesewenang-wenangan para pejabat daerah terhadap rakyat.

3. Kewaspadaan terhadap Ancaman Internal (Batiniyah)

Sebagai korban pembunuhan politik oleh kelompok Assassin, bab-bab akhir Siyasat-namah berisi peringatan keras mengenai bahaya infiltrasi kelompok heterodoks yang menyusup ke dalam istana dan birokrasi.

Sintesis Politik Persia, Islam, Dan Militer Turki

Kejeniusan politik Nizam al-Mulk terletak pada kemampuannya merajut tiga elemen kebudayaan dan kekuatan yang berbeda menjadi satu sintesis imperium yang harmonis. Ketiga elemen tersebut adalah:

1. Tradisi Tata Kelola Persia (Sasaniyah)

Meliputi sistem birokrasi sentralistik, konsep keagungan raja (divine right of kings yang disesuaikan dengan konsep Islam), serta tata administrasi keuangan yang profesional.

2. Legalitas dan Teologi Islam (Sunni Ortodoks)

Meliputi supremasi syariat, pengakuan terhadap otoritas spiritual Khalifah Abbasiyah, serta doktrin teologi Asy'ariyah yang menyatukan kaum beriman di bawah ortodoksi.

3. Kekuatan Militer Turkik (Seljuk)

Menyediakan daya gedor militer, ketangguhan kavaleri, dan ekspansi teritorial yang mengamankan dunia Islam dari ancaman eksternal.

Sintesis ini tidak hanya berhasil mempertahankan Dinasti Seljuk pada puncak kejayaannya, tetapi juga menjadi cetak biru (blueprint) bagi hampir seluruh dinasti Islam pasca-Seljuk, termasuk Imperium Utsmaniyah, Safawi, dan Mughal (Lapidus, 2002).

Analisis Kritis Kontradiksi Dan Warisan Pemikiran

Meskipun madrasah politik dan ideologi yang dibangun Nizam al-Mulk membawa stabilitas jangka pendek dan kemajuan intelektual, sejumlah sejarawan dan pengamat politik memberikan catatan kritis terhadap implikasi jangka panjang dari sistem tersebut. Pertama, instrumentalisasi pendidikan agama untuk kepentingan hegemoni politik negara sering kali membatasi kebebasan akademik dan meminggirkan pemikiran rasional filosofis (seperti mazhab Mu'tazilah atau filsafat peripatetik) demi menegakkan ortodoksi yang kaku (Makdisi, 1981).

Kedua, sentralisasi kekuasaan dan birokrasi yang sangat bergantung pada figur wazir dan sultan sering kali menciptakan kerapuhan struktural ketika suksesi kepemimpinan mengalami krisis. Pembunuhan Nizam al-Mulk pada tahun 1092 M oleh seorang anggota kelompok Batiniyah diikuti dengan disintegrasi imperium Seljuk ke dalam berbagai kesultanan kecil membuktikan bahwa imperium tersebut sangat bergantung pada kekuatan personal sang wazir (Cahen, 1968).

Namun demikian, warisan institusional Nizam al-Mulk tetap monumental. Model Madrasah Nizhamiyah diadopsi secara luas di seluruh dunia Islam dan menjadi cikal bakal universitas modern di Eropa melalui kontak kultural selama masa Perang Salib. Konsep hubungan antara etika, keadilan, dan tata kelola negara dalam Siyasat-namah terus menjadi bahan studi penting dalam sejarah pemikiran politik Islam klasik hingga era kontemporer.

KESIMPULAN

Lahirnya madrasah politik dan ideologi yang diprakarsai oleh Nizam al-Mulk merupakan respons brilian terhadap krisis multidimensional yang melanda dunia Islam pada abad ke-11 M. Melalui pendirian jaringan Madrasah Nizhamiyah, ia berhasil melembagakan ortodoksi Sunni (Asy'ariyah dan Syafi'i) sekaligus mencetak birokrat yang loyal guna memperkuat legitimasi Dinasti Seljuk dan Kekhalifahan Abbasiyah. Melalui karya monumentalnya, Siyasat-namah, Nizam al-Mulk merumuskan sintesis harmonis antara etika kenegaraan Persia, prinsip keadilan Islam, dan kekuatan militer Turkik. Meskipun mengandung aspek kontrol ideologis yang ketat, model institusional dan pemikiran politik Nizam al-Mulk telah meletakkan fondasi kokoh bagi kelangsungan peradaban Islam pertengahan dan memberikan kontribusi abadi bagi sejarah pemikiran politik global.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi berharga dalam penyelesaian artikel ini:

1. Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, atas fasilitas akademik dan dukungan institusional yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini berlangsung.
2. Rekan-rekan sejawat dan para peneliti di bidang sosiologi pendidikan Islam serta antropologi budaya, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan kritis, koreksi substansial, serta saran konstruktif guna menyempurnakan isi naskah ini.

3. Berbagai pihak dan instansi yang telah menyediakan akses literatur, referensi, serta sumber-sumber data pustaka sehingga kajian teoretis dalam penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Segala bentuk dukungan moril maupun materiel yang telah diberikan sangat berarti bagi kelancaran dan penyempurnaan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Boyle, J. A. (1968). The Cambridge History of Iran, Volume 5: The Saljuq and Mongol Periods. Cambridge: Cambridge University Press.

Cahen, C. (1968). Pre-Ottoman Turkey: A General Survey of the Material and Spiritual Culture and History c. 1071-1330. London: Sidgwick & Jackson.

Daftary, F. (1990). The Ismailis: Their History and Doctrines. Cambridge: Cambridge University Press.

Gibb, H. A. R. (1962). Studies on the Civilization of Islam. Boston: Beacon Press.

Halm, H. (1997). Shi'ite Islam: From Religion to Revolution. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Heffening, W. (1934). 'Madrasa'. Encyclopaedia of Islam, First Edition. Leiden: E. J. Brill.

Hitti, P. K. (2005). History of the Arabs: Rilis Edisi Terbaru. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Lambton, A. K. S. (1956). 'The Theory of Kingship in the Mirror for Princes'. Islamic Quarterly, 3(1), 47-55.

Lambton, A. K. S. (1981). State and Government in Medieval Islam: An Introduction to the Study of Islamic Political Theory. Oxford: Oxford University Press.

Lapidus, I. M. (2002). A History of Islamic Societies. Cambridge: Cambridge University Press.

Makdisi, G. (1981). The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Miskawayh, Ahmad ibn Muhammad. (2014). Tajarib al-Umam (Pengalaman Bangsa-Bangsa). Kairo: Dar al-Kutub.

Nizam al-Mulk. (1960). The Book of Government or Rules for Kings: The Siyar al-Muluk. Terjemahan oleh Hubert Darke. London: Routledge & Kegan Paul.